



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LASIRAN**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **205036**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/180 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 66 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/320 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/105 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/42 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.318.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, AVANZA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, AVANZA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOBIL, AVANZA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2017, LAINNYA Rp. 130.000.000



6.	MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, LAINNYA Rp. 375.000.000		
7.	MOBIL, CARETA TWO TONE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000		
8.	MOBIL, FORTHUNER TRO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	315.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	1.680.000.000
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.403.000.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	10.141.000.000
III.	HUTANG	Rp.	115.020.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.025.980.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.